

IMPLEMENTASI PROGRAM SERASI KASIH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN BAGI PARA LANSIA TERLANTAR DI KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

Arinda Kumala Sari

NPP. 32.0414

Asdaf Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: 32.0414@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Cut Laila Karmila, S.Sos., MA.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The complexity of social problems in Semarang Regency is revealed through three crucial indicators: the proliferation of a marginalized elderly population, inequality in the distribution of welfare assistance, and the economic burden placed on the productive generation by the high dependency ratio. These phenomena became the main basis that triggered the in-depth study. As a form of intervention, the Semarang Regency Government has initiated the Serasi Kasih Program, a strategic effort to address these issues. However, the program has encountered a number of significant hurdles, ranging from a scarcity of resources to weak synergies between relevant institutions, which present challenges in realizing its noble goals. **Purpose:** This study aims to examine the implementation of the Serasi Kasih Program in improving services for neglected elderly people in Semarang Regency. **Method:** This research adopts a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The data were analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing to obtain a comprehensive understanding of the policy implementation. **Result:** The results of the research on the Implementation of the Serasi Kasih Program for the Elderly in Semarang Regency were analyzed through several dimensions which showed that, in the dimension of the size and objectives of the policy had been carried out as applicable provisions, in the resource dimension there were some shortcomings in infrastructure resources and in some human resources, in the dimension of organizational characteristics of implementers there was a clear organizing structure along with the division of duties, in the dimension of the attitude of implementers had shown quite good professionalism, in the dimension of inter-organizational communication had also gone well as evidenced by the existence of structured coordination, in the dimension of the economic, social, political environment still needed to be improved again. **Conclusion:** The implementation of the Serasi Kasih Program in Semarang Regency has not been fully optimal. **Keywords:** Policy Implementation, Serasi Kasih Program, Neglected Elderly, Social Service Office, Semarang Regency.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kompleksitas permasalahan sosial di Kabupaten Semarang terungkap melalui tiga indikator krusial: menjamurnya populasi lanjut usia yang terpinggirkan, ketimpangan dalam penyaluran bantuan kesejahteraan, serta beban ekonomi yang menghimpit generasi produktif akibat tingginya rasio ketergantungan. Fenomena ini menjadi landasan utama yang memicu dilakukannya studi mendalam. Sebagai bentuk intervensi, Pemerintah Kabupaten Semarang telah menginisiasi Program Serasi Kasih, sebuah upaya strategis untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun, dalam perjalanannya, program ini masih harus berhadapan dengan sejumlah rintangan signifikan, mulai dari kelangkaan sumber daya hingga lemahnya sinergi antar lembaga terkait, yang menghadirkan tantangan tersendiri dalam mewujudkan tujuan mulianya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Serasi Kasih dalam meningkatkan pelayanan terhadap lansia terlantar di Kabupaten Semarang. **Metode:** Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian tentang Implementasi Program Serasi Kasih bagi Lansia di Kabupaten Semarang dianalisis melalui beberapa dimensi yang menunjukkan bahwa, pada dimensi ukuran dan tujuan kebijakan sudah dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku, pada dimensi sumber daya terlihat beberapa kekurangan pada sumber daya infrastruktur dan di beberapa sumber daya manusia, pada dimensi karakteristik organisasi pelaksana sudah terdapat susunan pengorganisasian yang jelas beserta pembagian tugasnya, pada dimensi sikap pelaksana sudah menunjukkan profesionalisme yang cukup baik, pada dimensi komunikasi antar organisasi juga sudah berjalan dengan baik terbukti dengan adanya koordinasi terstruktur, pada dimensi lingkungan ekonomi, sosial, politik masih perlu peningkatan kembali. **Kesimpulan:** Implementasi Program Serasi Kasih di Kabupaten Semarang belum sepenuhnya optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Serasi Kasih, Lansia Terlantar, Dinas Sosial, Kabupaten Semarang.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

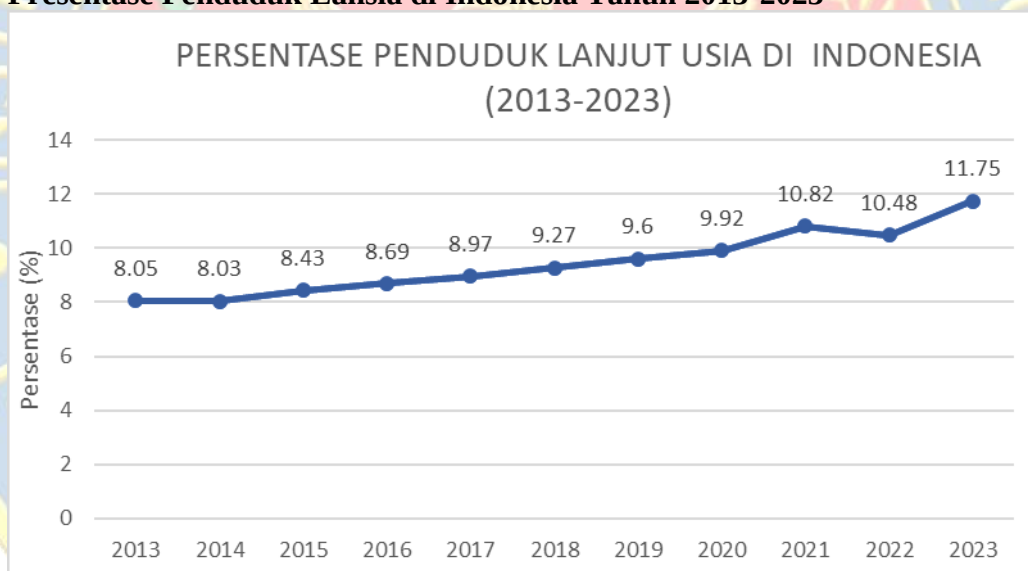
Pembangunan nasional bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi sosial masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidup. Dengan meningkatnya usia harapan hidup, jumlah lanjut usia pun bertambah, baik mereka yang masih produktif dan berkontribusi dalam kehidupan masyarakat, maupun mereka yang membutuhkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Melalui pelayanan public berbasis digital maka program kegiatan akan lebih cepat mencapai tujuan yang diinginkan (Nainggolan, 2024). Pelaksanaan pembangunan bidang sosial meliputi berbagai pelayanan pemberdayaan sosial bagi anak terlantar, anak jalanan dan santunan lansia terlantar, serta peningkatan pemberdayaan dan dukungan keluarga miskin (Seantio, 2023). Penelantaran pada lanjut usia banyak terjadi karena berbagai faktor seperti tidak adanya keluarga yang mengurus,

keterbatasan kesanggupan keluarga dalam mengurusnya, dan tidak terpenuhinya kebutuhan kehidupannya sehingga lanjut usia tidak bisa menjalankan fungsi sosialnya dengan baik (Arliyanti, n.d.). Data dari (World Health Organization, 2024) menunjukkan bahwa Populasi penduduk dunia menua dengan cepat. Pada Tahun 2020, 1 miliar orang di dunia adalah lanjut usia (lansia) atau berusia 60 tahun ke atas, mewakili 13% dari populasi global. Pada Tahun 2050, jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas akan meningkat dua kali lipat hingga menjadi 2,1 miliar. Sedangkan jumlah penduduk berusia 80 tahun atau lebih diperkirakan meningkat tiga kali lipat pada periode 2020-2050 hingga mencapai 426 juta (Murni et al., 2023)

Indonesia menajadi salah satu penyumbang jumlah lansia yang cukup banyak. Menurut (Badan Pusat Statistik, 2023), jumlah lansia di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 11,75% dari total populasi, naik sebesar 10,48% pada tahun 2022. Fenomena ini juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2023, provinsi ini memiliki persentase lansia sebesar 13,50%, menjadikannya provinsi keempat dengan lansia terbanyak setelah DIY, Jawa Timur, dan Bali. Kabupaten Semarang merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang menunjukkan tren peningkatan populasi lansia secara signifikan dari tahun ke tahun. Lansia disini didominasi oleh kaum miskin, kelompok miskin dikatan sebagai kelompok yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Saribulan et al., 2023)

Gambar 1. 1

Presentase Penduduk Lansia di Indonesia Tahun 2013-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari data tersebut, kita dapat memahami bahwa peningkatan jumlah lansia memberikan pentingnya perhatian terhadap kebijakan sosial dan pelayanan publik . Hal yang menjadi perhatian adalah peningkatan rasio ketergantungan lansia , yakni beban yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif terhadap kelompok lansia. Kabupaten Semarang mencerminkan kondisi tersebut. Penduduk lansia di daerah ini meningkat dari 125 ribu orang pada tahun 2020 menjadi 144 ribu orang pada tahun 2023. Artinya, ada peningkatan sekitar 1,36% dalam empat tahun terakhir. Hal ini mendorong peningkatan rasio ketergantungan lansia, yang naik dari 18,12 pada tahun 2020 menjadi 19,65 pada tahun 2022.

Tabel 1.1

Penduduk Lansia Kabupaten Semarang 2020-2023

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu)	Penduduk Lansia	
		Jumlah (Ribu)	Persentase
2020	1.051	125	11,94
2021	1.061	131	12,39
2022	1.071	137	12,84
2023	1.081	144	13,30

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk 2020-2035

Meningkatnya jumlah lansia tidak hanya berdampak pada beban ekonomi rumah tangga, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti lansia terlantar. Data dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 17 lansia terlantar di panti dan 150 lansia terlantar yang direhabilitasi di luar panti. Untuk menyambut hal ini, Pemerintah Kabupaten Semarang meluncurkan Program Serasi Kasih. Serasi kasih merupakan salah satu inovasi kebijakan. Inovasi kebijakan dikatakan sebagai suatu variasi kearah positif dalam pemaksimalan tujuan yang hendak dicapai (Rahman, 2023). Program ini merupakan bantuan sosial berupa pemberian makanan siap saji lansia kepada terlantar atau miskin yang hidup sendiri. Program ini diluncurkan pada tahun 2022 dan berlanjut pada tahun 2023 dan 2024. Tujuannya adalah meringankan beban ekonomi, menjaga gizi, serta menjamin keberlangsungan hidup para lansia yang tidak memiliki keluarga atau sumber pendapatan tetap. Program ini memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain:

- UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Perpres No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutan;
- Perbup Semarang No. 59 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Serasi Kasih.

Program serasi kasih menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Semarang karena dari Tahun 2020 hingga 2023 angka usia non produktif (lansia) selalu meningkat. Pemerintah Kabupaten Semarang juga mengupayakan agar para lansia mendapatkan pengakuan kependudukan dengan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar para lansia dapat masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini tidak lain digalakan agar pelayanan publik mampu meningkat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (Putri, 2021)

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat sejumlah permasalahan utama yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Salah satu permasalahan mendasar adalah meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia di Kabupaten Semarang setiap tahun, yang diikuti oleh naiknya rasio ketergantungan lansia terhadap penduduk usia produktif (Fine & Glendinning, 2005). Fenomena ini menunjukkan adanya beban sosial dan ekonomi yang semakin

besar bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjamin kesejahteraan lansia, khususnya bagi mereka yang hidup sebatang kara dan berada dalam kondisi miskin atau terlantar.

Meskipun pemerintah Kabupaten Semarang telah meluncurkan Program Serasi Kasih sebagai bentuk intervensi sosial, fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi program tersebut belum berjalan optimal (Williams, 2018). Salah satu indikasi ketimpangan adalah penurunan jumlah penerima manfaat dari 500 orang pada tahun 2022 menjadi hanya 127 orang pada tahun 2023 dan 2024, meskipun cakupan wilayah dan jumlah lansia yang membutuhkan bantuan tidak berkurang. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan nyata di masyarakat dengan realisasi program di lapangan.

Kesenjangan lainnya dapat dilihat dari aspek koordinasi antar pelaksana. Dalam praktiknya, pelaksanaan program melibatkan Dinas Sosial, TKSK, dan Wali Serasi Kasih, namun hubungan antar pemangku kepentingan belum terbangun secara maksimal. Belum optimalnya komunikasi dan sinergi antar lembaga pelaksana menjadi faktor penghambat dalam perluasan jangkauan dan efektivitas program (Risse, 2004). Selain itu, terbatasnya anggaran dan minimnya jumlah sumber daya manusia teknis turut menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Padahal secara normatif, terdapat banyak landasan hukum yang mendorong pentingnya pemenuhan hak-hak sosial lansia, mulai dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia hingga Peraturan Bupati Semarang Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas Yang Miskin Dan/Atau Terlantar Melalui Program Serasi Kasih. Namun kenyataannya, berbagai peraturan ini belum mampu menjamin terpenuhinya hak-hak dasar para lansia, terutama yang berada dalam kondisi rentan (Eversole, 2011).

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan secara normatif dengan implementasinya di lapangan. GAP inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yaitu untuk mengkaji sejauh mana implementasi Program Serasi Kasih telah berhasil mencapai tujuan kebijakan, serta mengidentifikasi faktor pendukung, penghambat, dan langkah optimalisasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan bagi lansia terlantar (Perry, 2019).

1.3 Penelitian Terdahulu

Permasalahan tentang kesejahteraan lansia, khususnya lansia terlantar, menjadi perhatian berbagai peneliti yang menyoroti upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial melalui program bantuan. Salah satu penelitian yang menyoroti hal ini adalah karya (Siswanto et al., 2024). dalam penelitiannya berjudul Implementasi Program Bantuan Sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Usia Lanjut Terlantar di Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis dan menemukan bahwa meskipun program bantuan sosial bagi lansia telah berjalan sejak tahun 2022 hingga 2023, namun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut antara lain aksesibilitas yang terbatas, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta kesulitan administratif seperti ketiadaan KTP atau KK pada sebagian lansia. Program ini memang memberi dampak positif terhadap kesejahteraan penerima, namun masih membutuhkan peningkatan pada aspek teknis dan kelembagaan

Sejalan dengan penelitian tersebut, (Qamariah et al., 2020) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Program Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar di Kota Batu menyoroti pelaksanaan program serupa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan lansia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik interaktif dan

menemukan bahwa pelaksanaan program berjalan cukup baik. Namun, pelaksana dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, dan kurangnya fasilitas seperti tempat penampungan sementara. Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan administratif dan logistik sangat mempengaruhi efektivitas program.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh (Kurniasti & Budiantara, 2023) dengan judul Implementasi Proses Pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masyarakat Lansia, Penyandang Disabilitas, dan Anak Terlantar di Wilayah Manokwari. Dengan pendekatan kualitatif dan metode participatory action, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program BLT berjalan lancar melalui kolaborasi antara Dinas Sosial Kabupaten Manokwari dan Bank Papua. Namun, beberapa kendala tetap muncul, seperti keterbatasan fasilitas pendukung dan prosedur pencairan yang dinilai rumit oleh sebagian penerima manfaat. Studi ini menegaskan pentingnya kemudahan akses dan dukungan teknologi dalam distribusi bantuan sosial

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh (Wicaksono, n.d.) dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai Optimalisasi Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji pelaksanaan PKH dalam memberikan pelayanan sosial kepada lansia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PKH telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan lansia melalui bantuan tunai bersyarat yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman sebagian pendamping sosial terhadap mekanisme pelaporan dan keterbatasan akses informasi di kalangan penerima manfaat lansia. Studi ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perluasan sosialisasi agar implementasi program dapat berjalan lebih efektif.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh (Andwiko Arhan, n.d.) dengan judul Efektivitas Program Tribina di Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Program Tribina Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia dalam mendukung pembangunan keluarga sejahtera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Tribina memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga, termasuk lansia, melalui kegiatan pembinaan rutin dan pelayanan kesehatan dasar. Namun, efektivitas program masih terhambat oleh keterbatasan anggaran dan kurangnya keterlibatan aktif masyarakat. Studi ini menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dan keberlanjutan program untuk memastikan manfaat yang merata, termasuk bagi kelompok lanjut usia.

Selanjutnya, (Handayani, 2020) dalam penelitiannya Bantuan Sosial bagi Warga Lanjut Usia di Masa Pandemi memaparkan peran penting bantuan pemerintah dalam mencegah meningkatnya ketergantungan lansia pada keluarga selama masa pandemi. Penelitian yang dilakukan melalui teknik desk review ini menyimpulkan bahwa bantuan sosial bukan hanya meredakan beban ekonomi keluarga, tetapi juga mengurangi risiko terjadinya “familisasi”, yaitu kondisi di mana tanggung jawab perawatan lansia sepenuhnya dibebankan kepada anggota keluarga tanpa dukungan eksternal. Namun, Handayani juga menyoroti bahwa ketergantungan pada skema bantuan jangka pendek berisiko menimbulkan ketidakterjaminan jangka panjang jika tidak dibarengi dengan sistem keberlanjutan.

Penelitian terakhir yang menjadi referensi adalah karya (Hasanah, 2024) yang berjudul Implementasi Program Simpati Lansia dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia di

Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menemukan bahwa secara umum implementasi program Simpati Lansia berjalan baik. Namun demikian, ditemukan kendala dalam aspek komunikasi dan pelaksanaan cek kesehatan berkala bagi para lansia yang menjadi sasaran program. Hal ini menunjukkan bahwa layanan kesehatan berkala sebagai bagian integral dari kesejahteraan lansia masih belum dijalankan secara optimal akibat lemahnya peran pelaksana di lapangan.

Secara keseluruhan, semua penelitian tersebut menunjukkan bahwa bantuan sosial bagi lansia, khususnya lansia terlantar, merupakan isu kebijakan publik yang kompleks dan masih menghadapi banyak tantangan. Permasalahan yang dihadapi relatif serupa, seperti keterbatasan sumber daya, kendala administratif, koordinasi antarinstansi yang belum maksimal, hingga ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi implementasi program secara menyeluruh.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian mengenai bantuan sosial bagi lansia terlantar umumnya masih terbatas pada pemberian uang tunai, sembako, atau rehabilitasi sosial di panti. Sebagian besar studi terdahulu berfokus pada program nasional seperti PKH, BPNT, atau pemberdayaan lansia secara umum. Misalnya, penelitian oleh (Siswanto et al., 2024) menyoroti asistensi rehabilitasi sosial lansia di Kuantan Singingi, sementara (Qamariah et al., 2020) membahas bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar lansia di Kota Batu. Penelitian (Kurniasti & Budiantara, 2023) lebih menekankan pada proses pencairan dana BLT untuk lansia dan kelompok rentan lainnya. Sementara itu, (Handayani, 2020) mengulas bantuan sosial di masa pandemi, dan (Hasanah, 2023) mengevaluasi program Simpati Lansia di Pamekasan yang lebih mengarah pada pelayanan kesehatan berkala. Tidak ada satu pun dari penelitian tersebut yang meneliti secara khusus model bantuan sosial berupa makanan siap saji yang diantarkan langsung setiap hari kepada lansia terlantar di tingkat kabupaten. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam Program Serasi Kasih di Kabupaten Semarang menunjukkan adanya inovasi baru dalam bentuk pelayanan langsung (door-to-door) kepada lansia yang sebatang kara, tidak mampu secara ekonomi, dan tidak memiliki dukungan keluarga, melalui distribusi makanan siap saji setiap hari.

1.5 Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi Program Serasi Kasih yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang dalam upaya meningkatkan pelayanan bagi para lansia terlantar.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Alasan pemilihan metode ini karena metode ini lebih efektif digunakan untuk memahami secara mendalam proses implementasi Program Serasi Kasih dalam meningkatkan pelayanan bagi para lansia terlantar di Kabupaten Semarang. menurut Moleong (2016), bahwa metode kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena secara holistik dalam konteks khusus melalui pengumpulan data secara natural. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang, dan ditentukan secara purposive (purposive sampling), yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi yang relevan dan berkompeten

terhadap pelaksanaan Program Serasi Kasih. Informan dipilih dari unsur pelaksana kebijakan, pengawas, dan penerima manfaat. Pendekatan ini digunakan agar data yang diperoleh bersifat mendalam dan relevan terhadap fokus penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Semarang, Kepala Bidang Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta pelaksana Program Serasi Kasih di tingkat kelurahan dan penerima manfaat program. Adapun informan kunci adalah informan yang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam pada topik yang Tengah dibahas, dalam hal ini informan kuncinya adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, karena Program Serasi Kasih yang dilaksanakan di Kabupaten Semarang ini dikelola langsung oleh Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Desain penelitian yang peneliti terapkan pada penelitian ini adalah desain studi kasus. Menurut (Creswell & Creswell, n.d.) “Desain studi kasus merupakan desain penelitian yang melibatkan analisis mendalam terkait suatu kasus spesifik, seperti sebuah program, peristiwa, aktivitas, dan proses”. Desain penelitian studi kasus pada penelitian ini sangat relevan karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi mendalam terkait pelaksanaan sebuah program kebijakan publik dalam konteks spesifik.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis interaktif model (Miles & Huberman, 1994) yang mencakup tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini dinilai efektif dalam menggali makna dari informasi kualitatif yang diperoleh dari lapangan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) sebagai landasan analisis. Teori ini terdiri dari enam variabel penting, yaitu: (1) ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik organisasi pelaksana, (4) sikap para pelaksana, (5) komunikasi antar organisasi, dan (6) kondisi sosial, ekonomi, dan politik (Van Meter & Van Horn, 1975). Teori ini dipilih karena mampu memberikan kerangka yang sistematis dalam mengevaluasi implementasi kebijakan publik dari sisi aktor, struktur, dan lingkungan kebijakan.

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 6 Januari 2025 hingga 25 Januari 2025 di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, karena merupakan daerah yang secara khusus melaksanakan Program Serasi Kasih dengan pendekatan pelayanan langsung kepada lansia terlantar. Lokasi penelitian meliputi Dinas Sosial Kabupaten Semarang, beberapa kecamatan tempat distribusi program, serta rumah-rumah penerima manfaat lansia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Bupati Semarang Nomor 59 Tahun 2022 merupakan peraturan yang mengatur Program Serasi Kasih yang didalamnya terdiri dari tujuan, sasaran kebijakan, kriteria, hingga proses pelaksanaan. Setelah mengkaji peraturan tersebut peneliti melakukan observasi (pengamatan) di Dinas Sosial yang merupakan pelaksana program tersebut, dengan diperkuat informasi yang peneliti peroleh dari hasil wawancara sesuai dengan informan yang telah ditetapkan.

Penyajian hasil penelitian diuraikan dalam bentuk deskriptif berupa uraian dan kutipan langsung dari narasumber. Berikut peneliti menyajikan analisis terhadap Implementasi Program Serasi Kasih dalam upaya meningkatkan pelayanan bagi para Lansia Terlantar di Kabupaten Semarang dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang meliputi enam dimensi yang akan dijelaskan berikut ini.

Implementasi Program Serasi Kasih dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Bagi Para Lansia Terlantar di Kabupaten Semarang

Program Serasi Kasih merupakan program unggulan Bupati Semarang yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan bagi para lansia terlantar. Program ini bertujuan untuk memberikan perhatian dan bantuan kepada lansia yang tidak memiliki keluarga atau lansia yang perekonomiannya kurang mampu. Kegiatan Program Serasi Kasih ini dilakukan dengan memberikan makanan sehat dan bergizi siap makan setiap hari kepada lanjut usia yang miskin dan/atau terlantar, hidup sebatang kara, tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara layak serta hidupnya bergantung pada hidup orang lain.

3.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa ukuran dan tujuan dari Program Serasi Kasih sudah dirumuskan dengan jelas dan terukur. Hal ini sesuai dengan konsep Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas implementasi. Dalam konteks Program Serasi Kasih, tujuan utamanya, yakni memberikan bantuan kepada lansia terlantar, sudah dituangkan dalam Peraturan Bupati Semarang. Kriteria penerima manfaat juga telah ditetapkan secara spesifik, sehingga memudahkan proses seleksi penerima bantuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, implementasi Program Serasi Kasih telah berjalan selaras dengan konsep teori yang digunakan.

3.2 Sumber Daya

Pada dimensi sumber daya, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dengan konsep Van Meter dan Van Horn. Secara teori, implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Namun, kenyataannya, Dinas Sosial Kabupaten Semarang masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia, khususnya pada bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Jumlah pegawai yang tersedia belum mampu menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Semarang secara merata. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala serius yang menyebabkan bantuan tidak dapat diberikan kepada seluruh lansia terlantar yang memenuhi kriteria. Dengan demikian, pada dimensi ini, pelaksanaan Program Serasi Kasih belum sepenuhnya sesuai dengan teori, karena kekurangan sumber daya menghambat optimalisasi program.

3.3 Karakteristik Organisasi

Berdasarkan temuan lapangan, karakteristik organisasi pelaksana dalam Program Serasi Kasih menunjukkan kesesuaian dengan teori Van Meter dan Van Horn. Teori ini menyatakan bahwa karakteristik organisasi, termasuk struktur birokrasi, pola hubungan kerja, dan komitmen terhadap kebijakan, sangat memengaruhi keberhasilan implementasi. Dinas Sosial Kabupaten Semarang, dibantu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Wali Serasi Kasih, telah melaksanakan tugas mereka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang ditetapkan. Mekanisme pengawasan terhadap jalannya program juga sudah dilakukan dengan cukup baik, di mana setiap kegiatan pelaksanaan bantuan dipantau secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana di lapangan telah mendukung efektivitas implementasi kebijakan sesuai dengan konsep yang diangkat.

3.4 Sikap Para Pelaksana

Pada dimensi sikap pelaksana, hasil penelitian juga memperlihatkan kesesuaian dengan teori Van Meter dan Van Horn. Menurut teori ini, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sikap para pelaksana terhadap program yang dijalankan, termasuk tingkat komitmen dan dukungan mereka. Di lapangan, ditemukan bahwa sikap para pelaksana, baik dari unsur Dinas Sosial, TKSK, maupun Wali Serasi Kasih, sangat positif. Mereka menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan kepada lansia terlantar dan mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah. Selain itu, pelaksana juga memperlihatkan profesionalisme dalam menjalankan program, serta memberikan pelayanan yang ramah dan manusiawi kepada penerima bantuan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sikap para pelaksana telah mendukung implementasi program sebagaimana digariskan dalam teori.

3.5 Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Dimensi komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Serasi Kasih masih belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Van Meter dan Van Horn. Teori ini menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antar aktor kebijakan untuk memastikan bahwa tujuan dan prosedur kebijakan dipahami dan diikuti secara konsisten. Di Kabupaten Semarang, meskipun koordinasi antara Dinas Sosial dengan TKSK dan Wali Serasi Kasih sudah berjalan baik, namun koordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan atau lembaga sosial lainnya belum optimal. Tidak adanya forum koordinasi lintas sektor menyebabkan sinergi program belum maksimal, yang berdampak pada keterbatasan layanan tambahan, seperti layanan kesehatan untuk lansia penerima manfaat. Dengan demikian, komunikasi dan koordinasi antar organisasi pelaksana perlu lebih diperkuat untuk mencapai efektivitas program yang lebih tinggi.

3.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Pada dimensi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori Van Meter dan Van Horn. Teori ini mengemukakan bahwa faktor lingkungan, seperti dukungan politik dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Lingkungan sosial Kabupaten Semarang yang masih memiliki tingkat kemiskinan dan angka ketergantungan yang cukup tinggi membuat keberadaan Program Serasi Kasih menjadi sangat relevan dan mendesak. Selain itu, dukungan politik dari pemerintah daerah terhadap program ini sangat kuat, baik dalam bentuk regulasi maupun dalam alokasi anggaran meskipun masih terbatas. Faktor-faktor ini memperkuat pelaksanaan program di lapangan, sehingga dimensi ini dapat dinyatakan sejalan dengan konsep teori yang digunakan.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Serasi Kasih di Kabupaten Semarang dalam memberikan pelayanan kepada lansia terlantar telah berjalan dengan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun program telah memiliki tujuan yang jelas dan dukungan dari pemerintah daerah, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya kolaborasi lintas instansi, serta keterbatasan anggaran. Temuan ini memberikan pemahaman baru mengenai pentingnya pendekatan pelayanan langsung berupa makanan siap saji dalam konteks kebijakan sosial di daerah, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia.

Demikian pula dengan temuan (Siswanto et al., 2024) dalam penelitian mereka di

Kabupaten Kuantan Singingi, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan sosial bagi lansia terlanter menghadapi kendala serupa, terutama dalam hal keterbatasan tenaga kerja sosial dan masalah administratif. Hal ini memperkuat temuan penelitian ini bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia dalam menjalankan layanan sosial yang responsif.

Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian (Qamariah et al., 2020) di Kota Batu yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung implementasi program bantuan lansia. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya peran aktif dari instansi pendukung seperti Dinas Kesehatan atau lembaga sosial di Kabupaten Semarang menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan Program Serasi Kasih, sejalan dengan penelitian Qamariah yang juga menemukan bahwa koordinasi yang lemah dapat menurunkan efektivitas program.

Namun berbeda dengan penelitian (Kurniasti & Budiantara, 2023) yang menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial dalam bentuk tunai di Manokwari berjalan cukup efektif melalui kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak bank, penelitian ini justru menemukan bahwa bentuk bantuan non-tunai berupa makanan siap saji meskipun diukur lebih tepat sasaran oleh pelaksana di lapangan, namun pelaksanaannya memerlukan keterlibatan operasional yang lebih intensif dan kompleks, termasuk dalam distribusi dan pengawasan harian.

Temuan ini juga menolak kesimpulan dalam beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa program bantuan sosial dapat berjalan efektif meskipun dengan dukungan minimal dari pihak ketiga. Justru dalam konteks Program Serasi Kasih, partisipasi masyarakat, penyedia makanan, dan peran lawan lokal menjadi kunci penting dalam mendukung pelaksanaan program harian. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik program yang berbasis pelayanan langsung memerlukan dukungan sosial yang kuat dari berbagai pihak agar dapat berjalan optimal.

Dengan demikian, penelitian ini memperluas ruang diskusi akademik tentang implementasi kebijakan sosial bagi lansia dengan menunjukkan bahwa bentuk bantuan berbasis makanan siap saji yang belum banyak dilakukan di daerah lain, memberikan tantangan tersendiri dalam aspek teknis, koordinasi, dan keinginan, namun sekaligus berpotensi menjadi model alternatif yang lebih manusiawi dan kontekstual untuk menjangkau lansia terlanter.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program Serasi Kasih dalam meningkatkan pelayanan bagi para lansia terlanter di Kabupaten Semarang telah berjalan dengan tujuan yang jelas sesuai Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022. Namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas. Organisasi pelaksana seperti Dinas Sosial, TKS, dan Wali Serasi Kasih telah berusaha secara maksimal dalam batas kemampuan yang ada, namun tantangan utama masih terletak pada rendahnya jangkauan layanan dan lemahnya koordinasi antar instansi.

Program ini didukung oleh faktor-faktor seperti komitmen pemerintah daerah dan komunikasi internal yang baik, namun dihambat oleh kurangnya kerja sama lintas sektor, minimnya tenaga teknis, serta belum menyeluruhnya penerima data manfaat. Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Sosial telah melakukan sejumlah upaya strategi seperti pengajuan tambahan anggaran, serta memperkuat koordinasi internal.

Secara keseluruhan, Program Serasi Kasih merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan lansia terlanter, namun tetap memerlukan peningkatan dalam hal efektivitas pelaksanaan, perluasan cakupan penerima, serta kolaborasi lintas sektor agar program dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Eversole, R. (2011). Community agency and community engagement: Re-theorising participation in governance. *Journal of Public Policy*, 31(1), 51–71. <https://doi.org/10.1017/S0143814X10000206>
- Fine, M., & Glendinning, C. (2005). Dependence, independence or inter-dependence? Revisiting the concepts of “care” and “dependency.” *Ageing and Society*, 25(4), 601–621. <https://doi.org/10.1017/S0144686X05003600>
- Murni, H. N. C., Nurfurkon, A., Uang, D. P., & Sadmoko, R. (2023). Public Service Transformation: Policy Analysis Through Apparatus Resource Reform. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 6(2), 131–145. <https://doi.org/10.33701/jkp.v6i2.3786>
- Nainggolan, R. R. E. (2024). Analisis Penggunaan Website dan Media Sosial Pemerintah untuk Pelayanan Publik. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 6(1), 1–21. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v6i1.4221>
- Perry, E. J. (2019). Making communism work: Sinicizing a Soviet governance practice. *Comparative Studies in Society and History*, 61(3), 535–562. <https://doi.org/10.1017/S0010417519000227>
- Putri, L. R. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Smart Campus Data Base (Scdb) Di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 3(2), 1–15. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v3i2.2308>
- Rahman, H. (2023). Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Inovasi Kebijakan di Indonesia. *Matra Pembaruan*, 7(1), 37–48. <https://doi.org/10.21787/mp.7.1.2023.37-48>
- Risse, T. (2004). Global Governance and Communicative Action. *Government and Opposition*, 39(2). <https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2004.00124.x>
- Saribulan, N., Rahman, H., & Rasanjani, S. (2023). Perkembangan Penelitian Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Bibliometrik dan Analisis Konten. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(2), 309–321. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.62375>
- Williams, C. J. (2018). Responding through transposition: Public Euroskepticism and European policy implementation. *European Political Science Review*, 10(1), 51–70. <https://doi.org/10.1017/S1755773916000187>
- Andwiko Arhan, D. (2023). EFEKTIVITAS PROGRAM TRIBINA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KB) KECAMATAN KOTA BARU KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13597>
- Arliyanti, B. (2023). KINERJA DINAS SOSIAL DALAM MENURUNKAN ANGKA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) BAGI LANJUT USIA TERLANTAR DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI. *Institut Pemerintahan Dalam*

Negeri. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14012>

Badan Pusat Statistik. (2022). *Profil Lansia Provinsi Jawa Tengah 2022*.

Handayani, S. (2020). Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia (Lansia) di Masa Pandemi. *Journal of Social Development Studies*, 1(2), 61–75. <https://doi.org/10.22146/jsds.657>

Hasanah, U. (2023). *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*.
<https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/download/1070/1028/3460>

Kurniasti, D., & Budiantara, M. (2023). IMPLEMENTASI PROSES PENCAIRAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PADA MASYARAKAT LANSIA, PENYANDANG DISTABILITAS DAN ANAK TERLANTAR DI WILAYAH MANOKWARI
IMPLEMENTATION OF THE DISBURSEMENT PROCESS OF DIRECT CASH ASSISTANCE FOR THE ELDERLY COMMUNITY, PERSONS WITH DISABILITIES AND NEGLECTED CHILDREN IN THE MANOKWARI REGION. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
<https://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/view/95>

Miles, M., & Huberman, A. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Vol. 338). SAGE Publications.

Moleong, L. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Qamariah, M., Kunci, K., Sosial, B., & Terlantar, L. (2020). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN LANSIA TERLANTAR (*Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu*) (Vol. 14, Issue 4).
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/8107>

Seantio, I. (2023). PENERAPAN INOVASI POS KONSULTASI TERPADU PENANGANAN MASALAH SOSIAL (POSKONSD PAMSOS) OLEH ALUMNI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAHAT. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
<http://eprints.ipdn.ac.id/15208/1>

Siswanto, Yukiani, F., & Meilani, N. L. (2024). 3. *Journal of Social Science Research*, 5326–5334. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework* (4th ed.).

Wicaksono, P. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI OPTIMALISASI PELAYANAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA DI KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
<http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/9561>

World Health Organization. (2024). Ageing and health. *World Health Organization* .
<https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>

